

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SKPD
KOTA SAMARINDA

Widiawati

Nim 1201035418

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Email: widiawati12@mhs.feb.unmul.ac.id

Abstarct

Widiawati " The Influence Understanding of Regional Financial accounting system and Organization Commitment on the Financial Management at SKPD of Samarinda City " under guidance of Mrs. Anis Rachma Utary as advisor I and Mrs. Musviyanti as advisor II .

Management finance regional of PP No.58 in 2005, every local government and SKPD is required to implement accounting system and make financial reports. Samarinda has 25 working units municipal level, 14 agency and local technical institute 11. The research only focused on the city level agencies samarinda which is implementing the element of local autonomy, and has the tasks of government affairs an area based on the principle of autonomy and duty of assistance.

The research aimed to analyze and know the Influence of understanding of regional financial accounting system and organizational commitment to financial management at SKPD kota Samarinda in local government . The method used in this research is quantitative method. The sample in this research is 14 SKPD in Samarinda and each SKPD represented by Head of finance, treasurer, treasurer of salary , and financial/accounting recording staff. The data collection method is to use a questionnaire and analysis techniques using Partial Least Square (PLS) with the help of smart PLS 3.0.

The results showed that financial accounting system have positive and significant effect on financial management, and organization commitment has a positive and significant effect on financial management. This proves that the better understanding of regional financial accounting system and organizational commitment to government agencies increased financial management.

Keywords: *Local government, financial accounting system, organization commitment and financial management.*

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi (Tuasikal, 2009).

Setiap pegawai selain dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai sistem akuntansi juga harus mempunyai komitmen terhadap organisasi. Komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Dengan adanya komitmen yang tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja, sehingga jika kinerja pegawai baik maka pengelolaan keuangan dalam organisasi juga akan meningkat. Individu berkomitmen terhadap sasaran artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau berusaha menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. (Pangastuti, 2008) menemukan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan pengelolaan keuangan.

Pada 16 April 2017, Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2016 masih ada temuan di beberapa organisasi pemerintah daerah. Maka dari itu pada tahun ini harus membenahi laporan keuangan Sejumlah SKPD diberi kebijakan untuk membenahi laporan keuangan, beberapa poin utama diantaranya penyusunan laporan keuangan, penyajian bendahara pengeluaran, penyajian akun pendapatan, akun belanja pegawai dan akun persediaan. Kepala Inspektorat Kota Samarinda, Mohammad yamin.

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa sistem akuntansi sangat penting diterapkan pada instansi pemerintahan daerah. Karena, sistem akuntansi sebagai alat kontrol keuangan yang dapat memberikan bantuan yang memadai untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya dan merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, untuk itu sudah seharusnya instansi pemerintahan berusaha untuk memperbaiki sistem akuntansi. Sedangkan seseorang dengan memiliki komitmen di organisasi pemerintah dapat memiliki pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kinerja pegawai melalui pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kebijakan
 - a. Menambah pengetahuan baru bagi pengelola keuangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Sebagai ukuran dan acuan kerja Pemerintah Kota Samarinda dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang berasal dari publik.
 - c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi SKPD Kota Samarinda dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi publik serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem akuntansi keuangan daerah

Menurut Permendagri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 232 ayat (3) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Halim (2013:40) sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh inputnya adalah bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah membayar. prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku pembantu. sedangkan hasil dari akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Mardiasmo (2009:147-148) menjelaskan bahwa aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian transaksi
Pengidentifikasian transaksi adalah suatu pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak.
2. Pencatatan transaksi
pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengolahan data transaksi ekonomi melalui penambahan atau pengurangan sumber daya yang ada.
3. Pencatatan Kronologis

Pencatatan yang dilakukan berurutan, maksudnya pencatatan diurutkan berdasarkan tanggal terjadinya.

4. Pengklasifikasian transaksi
proses pengelompokan transaksi berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan.
5. pelaporan yang konsisten dan periodik
pelaporan yang menerapkan standar akuntansi secara terus menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

2.2 Komitmen Organisasi

Robbins dan Judge (2007:22) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. *Lubis (2010:35)* menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Lubis (2010:40) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila setiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi atau profesi:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

2.3 Pengelolaan Keuangan

Definisi pengelolaan keuangan menurut *Halim, (2013:24)* adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut *Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah*, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan.

Menurut *Soleh (2010:10)*, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.
2. *Value for money*
Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila

penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

1. Pengendalian

Pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.

2.4 Kerangka Konsep dan Model Penelitian

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi. Dengan adanya pemahaman sistem akuntansi maka informasi dari sebuah organisasi tersedia dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal dan internal. Menurut Mulyadi (2006:19), bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Sedangkan, karyawan yang memiliki komitmen organisasi memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja baik secara individual, kelompok maupun organisasi dan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan usaha yang maksimal secara sukarela untuk kemajuan organisasi.

Dalam mengelola keuangan daerah yang baik dibutuhkan sistem akuntansi yang mengatur keuangan daerah agar tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam hal ini pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah.

Pada pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal

tersebut dibutuhkan peran pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kemampuan seorang pegawai untuk memahami suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat memahami informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Seseorang dikatakan paham terhadap sistem akuntansi apabila orang tersebut mengerti dan pandai bagaimana proses sistem akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan akuntansi keuangan daerah, pemahaman yang memadai mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah pada setiap satuan kerja pengelolaan keuangan organisasi akan meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Winanti (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemahaman akuntansi keuangan daerah ditingkatkan maka akan dapat mendorong pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Jika dikaitkan dengan pemerintah daerah maka dapat disimpulkan semakin paham pegawai bagian keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangannya, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik, termasuk satuan kerjanya. Usman (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan. Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki Pengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan SKPD.

2.5.2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Komitmen organisasi dipercaya kuat dan mendukung nilai dan sasaran yang diharapkan oleh organisasi. Disamping itu, komitmen organisasi dapat menjadi alat bantu psikologi dalam menjalankan organisasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Keterlibatan pegawai dalam kegiatan organisasi mencerminkan dedikasi pegawai dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas

organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan suatu kemampuan dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Dorongan yang ada pada setiap individu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, jika individu memiliki komitmen organisasi tinggi maka individu tersebut akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi yang menaunginya.

Winanti (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Harahap (2014) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, semakin tinggi komitmen yang dimiliki pegawai terhadap instansi tempat dia bekerja akan meningkatkan pengelolaan keuangan, karena seorang pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap instansi dimana dia bekerja maka akan timbul rasa senang dalam bekerja dan akan lebih berusaha melakukan yang terbaik dalam hal pekerjaannya untuk organisasinya tersebut sehingga pengelolaan keuangan akan meningkat.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen seorang pegawai bagian keuangan terhadap organisasi, maka pengelolaan keuangan akan semakin baik.

Hipotesis 2: Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

1. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kemampuan seorang pegawai untuk memahami suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat memahami informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Indikator untuk mengukur Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian (Nurliilah, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian transaksi
2. Pencatatan transaksi
3. Pencatatan kronologis
4. Pengklasifikasian transaksi
5. Pelaporan yang konsisten dan periodik

2. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana karyawan memihak dan peduli kepada organisasi dan tujuan organisasi serta suatu kondisi dimana loyalitas karyawan dibuktikan dengan berusaha tetap bertahan bersama organisasi yang ditempatinya.

Adapun indikator komitmen organisasi yang digunakan Winanti (2014) dalam penelitiannya yaitu:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

3.1.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan disetiap SKPD. Pengelolaan keuangan dapat menunjukkan bahwa semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh pegawai keuangan pada tiap SKPD, maka semakin baik pula kinerja keuangan pada instansi pemerintahan.

Adapun indikator Pengelolaan Keuangan yang digunakan Harahap (2014) dalam penelitiannya yaitu:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kota Samarinda yaitu sebanyak 25 SKPD.

Penelitian ini hanya difokuskan pada Dinas tingkat kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebanyak 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sampel penelitian. Adapun kriteria responden dalam pengambilan sampel adalah:

1. Pegawai bagian keuangan: Kepala bagian keuangan, bendahara, bendahara gaji dan staf pencatatan keuangan/akuntansi.
2. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintahan tersebut.

3.5 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*. *Partial Least Square* merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak

harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Samarinda

4.1. Sejarah Singkat Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Seluruh wilayah kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut dan udara. Dengan Sungai Mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda, yang menjadi "gerbang" menuju pedalaman Kalimantan Timur. Kota ini memiliki luas wilayah 718 kilometer persegi dan berpenduduk 812.597 jiwa, menjadikan kota ini berpenduduk terbesar di seluruh Kalimantan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan seorang pegawai dalam memahami prosedur dalam pembuatan laporan keuangan. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Sistem akuntansi memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang lengkap dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berkaitan dengan unit pemerintah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, karena diketahui bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh *t-statistic* sebesar 1,996 yang lebih besar dari 1,96. Indikator yang paling besar pengaruhnya yaitu pengidentifikasian transaksi (X1.1.1 0,889) dari hasil tersebut indikator pengidentifikasian transaksi dengan nilai (0,889) memiliki pengaruh yang tertinggi terhadap pengelolaan keuangan yang berarti pengidentifikasian transaksi yang dilaksanakan pada setiap SKPD kota Samarinda sudah berada dalam kategori baik. Pengidentifikasian transaksi adalah suatu pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Pada dasarnya aktivitas yang berhubungan dengan uang. Karena seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang.

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kemampuan seorang pegawai untuk memahami suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat memahami informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, hal ini menjelaskan bahwa

adanya pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang searah dengan pengelolaan keuangan atau dengan kata lain semakin paham pegawai bagian keuangan tentang sistem akuntansi maka semakin baik pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winanti (2014) dimana pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dan . Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.

4.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan

Komitmen organisasi alat ukur untuk melihat tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, karena diketahui bahwa variabel komitmen organisasi diperoleh *t-statistic* sebesar 6,362 yang lebih besar dari 1,96. Indikator yang paling besar urutannya yaitu Identifikasi ($X_{2.1.1}=0,864$) dari hasil tersebut indikator Identifikasi dengan nilai (0,864) memiliki pengaruh yang tertinggi terhadap pengelolaan keuangan, yang berarti identifikasi yang dilaksanakan pada setiap SKPD Kota Samarinda sudah berada dalam kategori baik. Identifikasi adalah suatu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana karyawan memihak dan peduli kepada organisasi dan tujuan organisasi serta suatu kondisi dimana loyalitas karyawan dibuktikan dengan berusaha tetap bertahan bersama organisasi yang ditempatinya.

Selain itu, hal ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh komitmen organisasi yang searah dengan pengelolaan keuangan atau dengan kata lain semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap pegawai pada bagian keuangan maka dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dalam organisasi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Harahap (2014) dimana komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Dengan demikian Hipotesis kedua (H_2) diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah di sebuah instansi, maka semakin meningkat pengelolaan keuangan.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi di sebuah instansi maka semakin meningkat pengelolaan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Samarinda dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan hendaknya lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Karena untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami) pemerintah daerah harus menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan pelaporan yang konsisten dan periodik.
2. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Samarinda dalam hal peningkatan komitmen organisasi hendaknya lebih meningkatkan keterlibatan pegawai dalam hal pengelolaan keuangan berupa peningkatan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan.
3. Menambahkan variabel lain yang dianggap berdampak terhadap pengelolaan keuangan, dan untuk lebih akuratnya penelitian ini selain menggunakan instrument kuesioner hendaknya juga menggunakan wawancara dan data penunjang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprila, Nila. 2013. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. *Jurnal*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Atmojo, Kurniawan Tri. 2010. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Djaali. 2008. *Skala Likert*. Pustaka Utama. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jogiyanto, dan Abdillah, Willy . 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Patial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPF: Yogyakarta.
- Madison, Kristen Joie. 2014. *Agency Theory and Stewardship Theory Integrated, Expanded, and Bounded by Context: An Empirical Investigation of Structure, Behavior, and Performance within Family Firms. Dissertations*. American : University of Tennessee.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- . 2016. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja*. Refika Aditama. Bandung.
- Nugroho, Fauzy Ardy. 2013. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Nugroho, Adam. 2009. *Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*. LGSP. Jakarta.
- Nurlillah, As Syifa. 2014. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Podrug, N, 2011, "*The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship*", Ekonomski Pregled.
- Syahrida, Cut Faiza. 2009. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD. *Jurnal*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tamara, Chintia ayu. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan. *Skripsi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Tuasikal, Askam. 2009. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal*. Maluku: Universitas Pattimura.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Usman. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Winanti, Sri. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Ratu Samban.
- Widodo. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedia Publishing. Jawa Timur.